

**PENGARUH DANA ALOKASI UMUM DAN PENDAPATAN ASLI
DAERAH TERHADAP BELANJA DAERAH
(Studi Pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota Di
Provinsi Papua)**

Fuad, Zakaria

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Yapis Papua
Alamat : Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 11 Dok V Atas, Jayapura Papua, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah pada APBD Kabupaten/Kota di Provinsi Papua. Rumusan masalah penelitian adalah apakah dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja daerah. Populasi dalam penelitian ini adalah kabupaten/kota di Provinsi Papua yang terdiri dari 28 kabupaten dan 1 kota. Maka sampel dalam penelitian ini berjumlah 5 Kabupaten dan 1 kota di Provinsi Papua.

Hasil analisis dengan menggunakan regresi linear berganda diperoleh hasil adalah hasil analisis menunjukkan nilai F_{hitung} sebesar 61.214 nilai F_{tabel} yaitu 4,20 dan nilai p -value atau signifikan sebesar 0.000. Nilai F_{hitung} dan F_{tabel} 2 yaitu $61.214 > 4,20$ atau $0.000 < 0,05$. Dengan demikian, maka H_0 ditolak dan H_a diterima yaitu dana alokasi umum (X_1) dan pendapatan asli daerah (X_2) secara simultan mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap belanja daerah (Y). Secara parsial dana alokasi umum mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Pendapatan asli daerah mempunyai pengaruh yang positif dan tidak signifikan terhadap belanja daerah.

Kata Kunci : Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Belanja Daerah.

PENDAHULUAN

Provinsi Papua merupakan daerah yang kaya akan sumber daya alam. Beberapa kabupaten di Provinsi Papua terus mengalami pemekaran sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tanggal 1 Januari 2001 tentang otonomi khusus Provinsi Papua. Pada tahun 2005, Provinsi Papua terdiri dari 19 kabupaten dan 1 kota dengan 250 kecamatan dan 2.442 kelurahan/desa. Kemudian pada tahun 2010, mekar menjadi 28 kabupaten dan 1 kota dengan 385 kecamatan dan 3.565 kelurahan/desa. Dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, maka daerah diberikan otonomi atau kewenangan kepada daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Adanya desentralisasi keuangan merupakan konsekuensi dari adanya kewenangan untuk mengelola keuangan secara mandiri. Apabila Pemerintah Daerah melaksanakan fungsinya secara efektif dan mendapat kebebasan dalam pengambilan keputusan pengeluaran disektor publik maka mereka harus mendapat dukungan sumber-sumber keuangan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan lain-lain dari pendapatan yang sah (Halim, 2009).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah hendaknya didukung upaya Pemerintah Daerah dengan meningkatkan kualitas layanan publik (Mardiasmo, 2002). Pendapatan Asli Daerah (PAD)

setiap daerah berbeda-beda. Daerah yang memiliki kemajuan dibidang industri dan memiliki kekayaan alam yang melimpah cenderung memiliki PAD jauh lebih besar dibanding daerah lainnya, begitu juga sebaliknya. Karena itu terjadi ketimpangan Pendapatan Asli Daerah. Disatu sisi ada daerah yang sangat kaya karena memiliki PAD yang tinggi dan disisi lain ada daerah yang tertinggal karena memiliki PAD yang rendah. Menurut Halim (2009) permasalahan yang dihadapi daerah pada umumnya berkaitan dengan penggalian sumber-sumber pajak dan retribusi daerah yang merupakan salah satu komponen dari PAD masih belum memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan. Kemampuan perencanaan dan pengawasan keuangan yang lemah. Hal tersebut dapat mengakibatkan kebocoran-kebocoran yang sangat berarti bagi daerah. Peranan Pendapatan Asli Daerah dalam membiayai kebutuhan pengeluaran daerah sangat kecil dan bervariasi antar daerah,yaitu kurang dari 10% hingga 50%. Sebagian besar wilayah Provinsi dapat membiayai kebutuhan pengeluaran kurang dari 10%. Distribusi pajak antar daerah sangat timpang karena basis paja kantar daerah sangat bervariasi. Peranan pajak dan retribusi daerah dalam pembiayaan yang sangat rendah dan bervariasi terjadi dikarenakan adanya perbedaan yang sangat besar dalam jumlah penduduk, keadaan geografis (berdampak pada biaya relative mahal) dan kemampuan masyarakat, sehingga dapat mengakibatkan biaya penyediaan pelayanan kepada masyarakat sangat bervariasi.

Otonomi daerah harus disadari sebagai suatu transformasi paradigma dalam penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan di daerah, dimana Pemerintah Daerah memiliki otonomi yang lebih luas untuk mengelola sumber-sumber ekonomi daerah secara mandiri dan bertanggung jawab yang hasilnya diorientasikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Transformasi paradigma dalam hal ini terletak pada aspek akuntabilitas Pemerintah Daerah dalam rangka mengelola sumber-sumber ekonomi yang semula bersifat akuntabilitas vertikal (kepada Pemerintah) menjadi akuntabilitas horizontal (kepada masyarakat didaerah) (Mardiasmo, 2002). Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik (public service) dan memajukan perekonomian daerah. Dengan adanya otonomi daerah ini berarti Pemerintah Daerah dituntut untuk lebih mandiri, tak terkecuali juga mandiri dalam masalah financial. Meski begitu Pemerintah Pusat tetap memberidana bantuan yang berupa Dana Alokasi Umum (DAU) yang di transfer ke Pemerintah Daerah. Dalam praktiknya, transfer dari Pemerintah Pusat merupakan sumber pendanaan utama Pemerintah Daerah untuk membiayai operasional daerah, yang oleh Pemerintah Daerah "dilaporkan" di perhitungan anggaran.

Tujuan dari transfer ini adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar pemerintah dan menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum di seluruh negeri (Maemunah, 2006).

Dana Alokasi Umum merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pembagian dana untuk daerah melalui bagi hasil berdasarkan daerah penghasil cenderung menimbulkan ketimpangan antar daerah. Daerah yang mempunyai potensi pajak dan Sumber Daya Alam (SDA) yang besar hanya terbatas pada sejumlah daerah tertentu saja.

Peranan Dana Alokasi Umum terletak pada kemampuannya untuk menciptakan pemerataan berdasarkan pertimbangan atas potensi fiskal dan kebutuhannya ta dari

masing-masing daerah (Undang-uundang No.33 Tahun 2004). Permasalahan Dana Alokasi Umum terletak pada perbedaan cara pandang antara pusat dan daerah tentang Dana Alokasi Umum. Bagi pusat, Dana Alokasi Umum dijadikan instrument horizontal imbalance untuk pemerataan atau mengisi fiscal gap. Bagi daerah, Dana Alokasi Umum dimaksudkan untuk mendukung kecukupan. Permasalahan timbul ketika daerah meminta Dana Alokasi Umum sesuai kebutuhannya. Di sisi lain, alokasi Dana Alokasi Umum berdasarkan kebutuhan daerah belum bisa dilakukan karena dasar perhitungan fiscal needs tidak memadai (terbatasnya data, belum ada standar pelayanan minimum masing-masing daerah, dan sistem penganggaran yang belum berdasarkan pada standar analisis belanja). Ditambah total pengeluaran anggaran khususnya APBD belum mencerminkan kebutuhan sesungguhnya dan cenderung tidak efisien.

Warsito, dkk (2008) mengatakan bahwa belanja daerah dirinci menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Belanja menurut kelompok belanja terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Menurut Halim(2009) belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan social, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Sedangkan belanja langsung merupakan belanja yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan program dan kegiatan yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal.

Peneliti sebelumnya seperti Noni Puspita Sari (2009) yang meneliti di Riau memperoleh hasil Pertama, DAU mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja langsung. Kedua, PAD secara parsial tidak mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap belanja langsung secara parsial. Ketiga, DAU dan PAD secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Langsung.

Syukriy & Halim(2003) yang meneliti di Jawa dan Bali memperoleh hasil yaitu baik secara parsial maupun simultan PAD dan DAU signifikan berpengaruh terhadap Belanja Daerah.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan yang dikemukakan diatas maka dapat diidentifikasi suatu rumusan masalah sebagai berikut :

Apakah Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh secara parsial maupun simultan terhadap belanja daerah?

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah : Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh secara parsial maupun simultan terhadap belanja daerah.

TINJAUAN PUSTAKA

Belanja Daerah

Belanja daerah adalah semua pengeluaran Pemerintah Daerah pada suatu periode anggaran. APBD terdiri dari tiga komponen utama, yaitu unsure penerimaan, belanja rutin dan belanja pembangunan. Ketiga komponen itu meskipun disusun hampir secara bersamaan, akan tetapi proses penyusunannya berada dilembaga

yang berbeda (Halim,2002). proses penyusunan APBD secara keseluruhan berada ditangan sekretaris daerah yang bertanggung jawab mengkoordinasikan seluruh kegiatan penyusunanAPBD. Sedangkan proses penyusunan belanja rutin disusun oleh bagian keuangan pemerintah daerah, proses penyusunan penerimaan dilakukan oleh Dinas PendapatanDaerah dan proses penyusunan belanja penyusunan disusun oleh Bappeda (Dedy Haryati et al,2001 dalam Pratiwi, 2007).

Menurut penelitian Pambudi (2007) belanja juga dapat dikategorikan menurut karakteristiknya menjadi dua bagian, yaitu: (1) Belanja selain modal (Belanja administrasi umum; Belanja operasi, pemeliharaan sarana dan prasarana public; Belanja transfer; belanja tak terduga).(2) belanja modal.

Dana Alokasi Umum

Dana alokasi umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Pembagian dana untuk daerah melalui bagi hasil berdasarkan daerah penghasil cenderung menimbulkan ketimpangan antar daerah dengan mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah.

Alokasi dana alokasi umum bagi daerah yang potensi fiskalnya besar namun kebutuhan fiskalnya kecil akan memperoleh alokasi dana alokasi umum yang relative kecil. Sebaliknya daerah yang memiliki potensi fiskalnya kecil namun kebutuhan fiskalnya besar akan memperoleh alokasi dana alokasi umum relative besar. Dengan maksud melihat kemampuan APBD dalam membiayai kebutuhan-kebutuhan daerah dalam rangka pembangunan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD dikurangi dengan belanja pegawai (Halim, 2009).

Menurut Halim (2009) ketimpangan ekonomi antara satu provinsi dengan provinsi lain tidak dapat dihindari dengan adanya desentralisasi fiskal. Disebabkan oleh minimnya sumber pajak dan sumber daya alam yang kurang dapat digali oleh pemerintah daerah. Untuk menanggulangi ketimpangan tersebut, pemerintah pusat berinisiatif untuk memberikan subsidi berupa DAU kepada daerah. Bagi daerah yang tingkat kemiskinannya lebih tinggi, akan diberikan DAU lebih besar dibanding daerah yang kaya dan begitu juga sebaliknya. Selain itu untuk mengurangi ketimpangan dalam kebutuhan pembiayaan dan penugasaan antara pajakdaerah telah diatasi dengan adanya kebijakan bagi hasil dan dana alokasi umum minimal sebesar 26% dari penerimaan dalam negeri. Dana alokasi umum akan memberikan kepastian daerah dalam memperoleh sumber pembiayaan untuk membiayai kebutuhan pengeluaran yang menjadi tanggung jawab masing-masing daerah.

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Penerimaan pendapatan asli daerah merupakan akumulasi dari pos penerimaan pajak yang berisi pajak daerah dan pos retribusi daerah, pos penerimaan non pajak uang berisi hasil perusahaan milik daerah, pos penerimaan investasi serta pengelolaan sumber daya alam (Bastian, 2002).

Pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Identifikasi sumber pendapatan asli daerah adalah meneliti, menentukan dan menetapkan mana sesungguhnya yang menjadi sumber pendapatan asli daerah dengan cara meneliti dan mengusahakan serta mengelola

sumber pendapatan tersebut dengan benar sehingga memberikan hasil yang maksimal (Elita dalam Pratiwi,2007). Kendala utama yang dihadapi pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah adalah minimnya pendapatan yang bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD).

Proporsi pendapatan asli daerah yang rendah, dilain pihak menyebabkan pemerintah daerah memiliki derajat kebebasan rendah dalam mengelola keuangan daerah. Sebagian besar pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan,dibiayai dari dana perimbangan, terutama dana alokasi umum. Alternative jangka pendek peningkatan penerimaan pemerintah daerah adalah menggali dari pendapatan asli daerah(Pratiwi, 2007).

Kerangka Konseptual

PAD adalah pendapatan asli daerah yang terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dari laba perusahaan daerah dan lain-lain pendapatan yang sah. Dana alokasi umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Belanja daerah adalah semua pengeluaran pemerintah daerah pada suatu periode anggaran. Dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah mempunyai pengaruh terhadap belanja daerah.

Hipotesis Penelitian

1. H_{a1} : Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif dan signifikan Terhadap Belanja Daerah
2. H_{a2} : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan Terhadap Belanja Daerah
3. H_a : Dana Alokasi Umum (DAU) dan PAD berpengaruh positif dan Signifikan terhadap belanja daerah.

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah kabupaten/kota di Provinsi Papua yang terdiri dari 28 kabupaten dan 1 kota. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sampel dalam penelitian ini adalah sebagian dari populasi karena kurangnya ketersediaan data yang dimiliki. Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah purposive sampling yaitu teknik mengambil sampel dengan menyesuaikan diri berdasar kriteria atau tujuan tertentu. Maka sampel dalam penelitian ini berjumlah 5 Kabupaten dan 1 kota di Provinsi Papua. Data sekunder yang digunakan bersumber pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang diperoleh dari internet melalui situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah (www.djpk.depkeu.go.id) tahun anggaran 2007-2011.

Model Regresi Linear Berganda

Alat analisis yang digunakan untuk pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Analisis ini digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, dengan asumsi variabel yang lain konstan, dimana rumusnya: (Ghozali, 2005)

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan :

Y = Belanja daerah

X_1 = Dana Alokasi Umum

- X_2 = Pendapatan Asli Daerah
 a = Konstanta regresi
 b_1, b_2 = Koefisien regresi
 e = factor kesalahan

HASIL PENELITIAN

Hasil Penelitian

1. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Hasil pada table statistik deskriptif yang terdapat pada lampiran 3 menunjukkan jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah sebanyak 5 tahun yaitu periode tahun 2007-2011. Dana Alokasi Umum yang diperoleh Provinsi Papua yang paling rendah selama tahun 2007-2011 adalah sebesar 243,3 milyar pada tahun 2009 pada Kabupaten Puncak Jaya, sedangkan pada tahun 2011 merupakan tahun dimana Dana Alokasi Umum yang diterima paling besarnya itu sebesar 754 milyar pada Kabupaten Merauke. Rata-rata penerimaan Dana Alokasi Umum per tahun selama tahun 2007-2011 adalah sebesar 414,8 milyar dan standar deviasi sebesar 133,8 milyar.

Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh Provinsi Papua yang paling rendah selama tahun 2007-2011 adalah sebesar 3,63 milyar pada tahun 2011 pada Kabupaten Puncak Jaya, sedangkan pada tahun 2012 merupakan tahun dimana Pendapatan Asli Daerah yang diterima paling besar yaitu sebesar 106,5 milyar pada Kabupaten Merauke. Rata-rata penerimaan Pendapatan Asli Daerah pertahun selama tahun 2007-2011 adalah sebesar 30,2 milyar dan standar deviasi sebesar 29,76 milyar.

Belanja Daerah Provinsi Papua selama 5 tahun selalu mengalami peningkatan, dengan rata-rata pengeluaran belanja daerah pertahun selama tahun 2007-2011 sebesar 634,2 milyar. Belanja daerah terendah sebesar 411,6 milyar pada tahun 2007 pada Kabupaten Keerom dan Belanja daerah tertinggi sebesar 1,1 trilyun pada tahun 2010 pada Kabupaten Merauke.

2. Hasil Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Berdasarkan hasil uji normalitas dengan menggunakan SPSS 21 pada lampiran 3 dapat dilihat pada gambar *normal probably plot* data (titik) menyebar secara teratur di sekitar garis diagonal. Hal ini menunjukkan bahwa data yang digunakan terdistribusi secara normal sehingga model regresi memenuhi asumsi klasik. Kemudian Berdasarkan hasil uji normalitas dengan menggunakan SPSS 21 pada lampiran 3 dapat dilihat pada table One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test bahwa DAU, PAD dan Belanja Daerah masing-masing memiliki nilai K-S 1,388, 1,019, 1,173, dengan nilai Asymp signifikansi masing-masing 0,062, 0,251, 0,128 dimana hasil tersebut menunjukkan tingkat signifikansi nilai K-S yang lebih besar dari 0,05 yang dipersyaratkan sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima atau data terdistribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Berdasarkan hasil uji multikolonieritas dengan menggunakan SPSS 21 pada lampiran 3, dapat dilihat bahwa DAU dan PAD masing-masing memiliki nilai tolerance 0,374, dan, 0,374 dan nilai VIF masing-masing 2,673, 2,673 dimana hasil tersebut menunjukkan nilai tolerance $> 0,10$ dan nilai VIF < 10 . Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa variable

independen yang digunakan dalam model regresi penelitian ini adalah terbebas dari multikolonieritas.

c. Uji Autokorelasi

Berdasarkan Uji Run Test dengan SPSS 21 pada lampiran 3, terlihat nilai Asymp. Sig. (2-tailed) 0,853. Oleh karena nilai Asymp. Sig 0,853 lebih besar dari 0,05 maka H_0 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi hal ini sesuai dengan kriteria/ penolakan pengujian *Run Test* (Sunjoyo, dkk,2013:77).

d. Uji Heteroskedastisitas

Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada output Regression di Lampiran 3 dimana gambar Scatterplot menunjukkan bahwa titik– titik menyebar dengan pola yang tidak jelas diatas dan di bawah angka nol pada sumbu Y jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedasitas pada model regresi.

3. Regresi Linier Berganda

Model regresi yang digunakan adalah linier berganda, hal ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh variable dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah. Adapun ringkasan analisis regresi linier berganda yang dilakukan dengan alat bantu program SPSS 21 adalah :

Tabel 4.4
Rangkuman Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Variabel	Koefisien	Statistik-t	Sign.(P)
Konstanta	270117963846.137	5.153	.000
DAU (X_1)	.816	5.115	.000
PAD (X_2)	1.403	1.954	.061
Adjusted R^2	0.806		
Statistik-F	61.214		
Sign (P)	0.000		

(Sumber: data sekunder yang diolah, 2013)

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

$$Y = 270117963846.137 + 0.816X_1 + 1.403X_2 + e$$

Berdasarkan hasil olah data pada tabel di atas, diketahui nilai konstanta 270117963846.137, koefisien regresi (b_1) Dana Alokasi Umum sebesar 0.816 dan koefisien regresi (b_2) Pendapatan Asli Daerah sebesar 1.403

a. jika variabel independen yaitu Dana Alokasi Umum (X_1) dan Pendapatan Asli Daerah sebesar (X_2) dianggap konstan atau nol, maka Belanja daerah Pemerintah Daerah Kota Jayapura akan meningkat sebesar 270117963846.137 rupiah.

b. Koefisien regresi Dana Alokasi Umum (X_1) sebesar 0.816. Hasil ini menunjukkan hubungan positif antara Dana Alokasi Umum dengan Belanja daerah. Apabila penerimaan Provinsi Papua dari Dana Alokasi Umum bertambah sebesar 1 rupiah maka Belanja daerah akan mengalami

peningkatan sebesar 0.816, dengan asumsi variable Pendapatan Asli Daerah nilainya tetap.

- c. Koefisien regresi Pendapatan Asli Daerah sebesar 1.403. Hasil ini menunjukkan hubungan positif antara Pendapatan Asli Daerah dengan Belanja daerah. Apabila penerimaan Provinsi Papua dari Pendapatan Asli Daerah bertambah sebesar 1 rupiah maka Belanja daerah akan mengalami peningkatan sebesar 1.403, dengan asumsi variabel Dana Alokasi Umum nilainya tetap.

4. Pengujian Hipotesis

a. Uji Parsial (Uji t Statistik)

Pengujian ini untuk melihat sejauh mana pengaruh secara terpisah dari masing-masing variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y).

- 1) Pengujian hipotesis pertama Pengujian ini dilakukan untuk menguji pengaruh Dana Alokasi Umum (X_1) terhadap Belanja Daerah (Y). Berdasarkan table 4.4 di atas diperoleh t_{hitung} sebesar 5.115, untuk menentukan t_{tabel} dapat dicari dengan menggunakan tabel statistik pada signifikansi $\alpha = 0,05$, $df = n - k - 1$ maka diperoleh $df = 30 - 2 - 1 = 27$ sehingga diperoleh t_{tabel} sebesar 2,048. Perbandingan antara t_{hitung} dan t_{tabel} yaitu $5.115 > 2,048$, maka H_0 ditolak dan H_{a1} diterima. Dengan melakukan pengujian pada derajat signifikansi atau pada tingkat probabilitas, dari hasil uji t diperoleh signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$, maka H_0 ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Dana Alokasi Umum (X_1) signifikan terhadap belanja daerah (Y). karena nilai koefisien b_1 tanda positif maka menunjukkan arah hubungan yang searah antara Dana Alokasi Umum dengan Belanja Daerah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja daerah.
- 2) Pengujian hipotesis kedua Pengujian ini dilakukan untuk menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah (X_2) terhadap Belanja daerah (Y). Berdasarkan table 4.4 di atas diperoleh t_{hitung} sebesar 1,954 sedangkan t_{tabel} 2,048. Perbandingan antara t_{hitung} dan t_{tabel} yaitu $1,954 < 2,048$, maka H_0 diterima dan H_{a2} ditolak. Dengan melakukan pengujian pada derajat signifikansi atau pada tingkat probabilitas, dari hasil uji t diperoleh signifikansi sebesar $0,061 > 0,05$, maka H_0 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (X_2) tidak signifikan terhadap Belanja Daerah (Y), karena nilai koefisien b_2 tanda positif, maka Pendapatan Asli Daerah menunjukkan hubungan yang searah dengan Belanja Daerah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Belanja daerah.

b. Uji Simultan (Uji Statistik F)

Uji simultan merupakan uji secara bersama-sama untuk menguji signifikansi pengaruh variabel Dana alokasi umum (X_1) dan Pendapatan Asli Daerah (X_2) secara bersama-sama terhadap variable Belanja daerah (Y).

Berdasarkan tabel 4.4 hasil Uji Statistik F diperoleh F hitung sebesar 61.214. Untuk menentukan F_{tabel} dapat dicari dengan menggunakan tabel statistik pada signifikansi $\alpha = 0,05$, $df_1 = k - 1$, $df_2 = n - k$ maka diperoleh $df_1 = 2 -$

1=1 dan $df_2 = 30 - 2 = 28$ sehingga diperoleh F_{tabel} sebesar 4,20. Perbandingan antara F_{hitung} dan F_{tabel} yaitu $61.214 > 4,20$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima Dengan melakukan pengujian pada derajat signifikansi atau pada tingkat probabilitas, dari hasil uji F diperoleh signifikansi sebesar $0.000 < 0,05$ atau probabilitas $< 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variable Dana alokasi umum (X_1) dan Pendapatan Asli Daerah (X_2) berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap Belanja daerah (Y).

c. Koefisien Determinasi

Berdasarkan tabel 4.4 besarnya Adjusted R^2 adalah 0.806, hal ini berarti 80.6% variable Belanja daerah bisa dijelaskan oleh variabel Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah. Sedangkan sisanya ($100\% - 80.6\% = 19.4\%$) dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain di luar model.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis data penelitian dapat dijelaskan secara parsial pengaruh dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah

Berdasarkan uji parsial antara DAU (X_1) terhadap Belanja Daerah (Y), hasil pengujian menunjukkan bahwa DAU yang diterima oleh Provinsi Papua sudah sesuai dengan kebutuhan belanja daerah Provinsi Papua. Berhasil dibuktikan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah. Hasil ini ditandai dengan nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ dan probabilitasnya lebih kecil dari standar signifikansi yang ditentukan, dimana signifikansi dari hasil olah statistik yaitu 0.000, nilainya lebih kecil dari pada nilai α (alpha) yang ditetapkan sebesar 0,05. Pada koefisien regresi berganda nilai yang diperoleh sebesar (0.816) menjelaskan bahwa apabila terjadi penambahan 1 rupiah Dana Alokasi Umum maka akan meningkatkan Belanja Daerah kota Jayapura sebesar 0.816 dengan anggapan bahwa variabel lain dianggap konstan

2. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah

Berdasarkan uji parsial antara PAD (X_2) terhadap Belanja Daerah (Y), hasil pengujian menunjukkan bahwa PAD yang diterima oleh pemerintah daerah kota Jayapura belum sesuai dengan kebutuhan belanja daerah kota Jayapura. Berhasil dibuktikan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap belanja daerah. hasil ini ditandai dengan nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ dan probabilitasnya lebih besar dari standar signifikansi yang ditentukan, dimana signifikansi dari hasil olah statistik yaitu 0,061, nilainya lebih besar dari pada nilai α (alpha) yang ditetapkan sebesar 0,05. Pada koefisien regresi berganda nilai yang diperoleh sebesar (1.403) menjelaskan bahwa apabila terjadi penambahan 1 rupiah Pendapatan Asli Daerah maka akan meningkatkan Belanja Daerah kota Jayapura sebesar 1.403 dengan anggapan bahwa variabel lain dianggap konstan.

3. Pengaruh DAU dan PAD terhadap Belanja Daerah

Berdasarkan uji simultan antara DAU (X_1) dan PAD (X_2) terhadap Belanja Daerah (Y), hasil pengujian menunjukkan bahwa secara simultan DAU dan PAD yang oleh Provinsi Papua sudah sesuai dengan kebutuhan belanja daerah Provinsi Papua. Hal ini ditandai dengan nilai $f_{hitung} < f_{tabel}$ dan probabilitasnya lebih besar dari standar signifikansi yang ditentukan, dimana hasil olah statistik diperoleh F hitung sebesar 61.214 $> 4,20$ dengan tingkat probabilitas 0.000 (signifikansi) yang jauh

lebih kecil dari pada nilai α (alpa) yang ditetapkan sebesar 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa DAU dan PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan dengan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dana alokasi umum (X_1) dan pendapatan asli daerah (X_2) secara simultan mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap belanja daerah(Y)
2. Dana alokasi umum mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap belanja daerah.
3. Pendapatan asli daerah mempunyai pengaruh yang positif dan tidak signifikan terhadap belanja daerah.
4. Nilai koefisien determinasi simultan(R^2) tinggi yaitu sebesar 0.806 yaitu sebesar 80,6%.

Saran

Berdasarkan dengan hasil penelitian dan kesimpulan, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemerintah provinsi papua diharapkan bisa terus menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah, Pemerintah provinsi papua diharapkan terus mengupayakan untuk bisa menarik Dana Alokasi Umum semaksimal mungkin, Serta memaksimalkan belanja daerahnya demi tercapainya provinsi papua yang mandiri, adil, makmur dan sejahtera.
2. Bagi peneliti selanjutnya, sebaiknya menggunakan seluruh populasi dari Kabupaten/Kota agar memperoleh hasil yang lebih relevan.
3. Bagi peneliti selanjutnya, penambahan variabel baru sebagai variabel independen maupun variabel dependen sangat penting untuk melengkapi hasil penelitian terdahulu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Syukriy & Abdul Halim, "Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Pemerintah Daerah :Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali", Simposium Nasional Akuntansi VI, Surabaya, 16-17 Oktober, 2003
- Ardhini, 2011. Pengaruh Rasio Keuangan Daerah Terhadap Belanja Modal Untuk Pelayanan Publik Dalam Perspektif Teori Keagenan (Studi Pada Kabupaten Dan Kota di Jawa Tengah).
- Ghozali, imam, 2006. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS Edisi 4.
- Maimunah, Mutiara, (2006). Meneliti tentang *Pengaruh DAU dan PAD terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di pulau Sumatera*. Simposium Nasional Akuntansi IX. Padang
- Mardiasmo, 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Noni Puspita Sari, (2009). Meneliti tentang *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Langsung* (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 *Tentang Belanja Daerah*. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 *Tentang Rencana Kerja Pemerintah*. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 *Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga*. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006 *Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah dan Badan Kepegawaian Daerah*

Prakosa, Kesit Bambang, "Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Prediksi Belanja Daerah ;Studi Empirik di Wilayah Propinsi Jawa Tengah dan DIY", JAAI Vol 08 No 2, Desember, 2004

Rahmawati, 2010 *Meneliti tentang Pengaruh PAD dan DAU terhadap Alokasi Belanja Daerah Kota Jawa Tengah*. Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara pemerintah Pusat dan Daerah.